

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022



MIZPA AGATHA SAPAN

1910321005

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Akuntansi

MIZPA AGATHA SAPAN

1910321005

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022

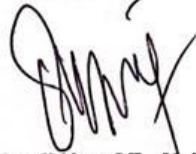
disusun dan diajukan oleh

MIZPA AGATHA SAPAN
1910321005

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 25 Juli 2023

Pembimbing



Suriyadi Nur, SE., M.Ak
NIDN : 0901038306

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial

Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI

Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN : 0925107801

SKRIPSI

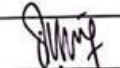
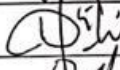
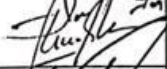

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022

disusun dan diajukan oleh

MIZPA AGATHA SAPAN
1910321005

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 25 Juli 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Suriyadi Nur, SE., M.Ak., CDVP NIDN: 0901038306	Ketua	
2.	Dinar, S.E., M.Si., CTA., ACPA NIDN: 0916058001	Sekretaris	
3.	Andi Zulfakar Yudha, P.S, SE., M.Si., CRMO NIDN: 0907069103	Anggota	
4.	Dr. Habib Muhammad Shahib, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA., CSRS., CSRA., CLI NIDN: 0930099101	Eksternal	

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



UNIVERSITAS FAJAR
EKONOMI
Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si./Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Mizpa Agatha Sapan

NIM : 1910321005

program studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2020-2022** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2023, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Mizpa Agatha Sapan

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022”. Penyusunan skripsi ini adalah syarat untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar sarjana di Universitas Fajar.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan dan hambatan namun berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua tercinta dan kakak tercinta yang sudah mensupport dalam penelitian skripsi ini serta kepada Bapak Suriyadi Nur, SE., M.Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, mengarahkan, dan memberi masukan peneliti dalam menyusun laporan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.Ikom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Yasmi, SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar.
4. Bapak Muh. Ridwan Hasanuddin, SE, M.Si, Ak, CA, CTA, ACPA selaku Dosen Penasehat Akademik peneliti.
5. Segenap dosen dan staf Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar.
6. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan bahasa maupun materi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritik yang membangun dari para pembaca. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Makassar, 25 Juli 2023

Peneliti

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022

**Mizpa Agatha Sapan
Suriyadi Nur**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa tahun 2020-2022 dilihat dari 5 Rasio keuangan daerah : 1)Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 2)Rasio Efektivitas PAD, 3)Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, 4)Rasio Keserasian, 5)Rasio Pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa. Pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan rata-rata 2,64% dikategorikan rendah sekali dimana kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih sangat rendah serta pendapatan transfer masih sangat tinggi. (2) Rasio Efektivitas PAD dengan rata-rata sebesar 76,14% dikategorikan kurang efektif yang berarti kinerja Pemerintah Kabupaten Mamasa dapat dikatakan masih kurang dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dengan rata-rata sebesar 104,81% dikategorikan tidak efektif karena memiliki rata-rata melebihi 100% yang artinya Pemerintah Kabupaten Mamasa masih harus meminimalisir jumlah belanjanya dan meningkatkan pendapatannya agar tidak lagi terjadi defisit APBD kedepannya (4) Rasio Keserasian dianggap belum baik karena belanja operasi jauh lebih besar dibanding belanja modal. (5)Rasio Pertumbuhan ditinjau dari Rasio Pertumbuhan PAD masih kurang baik dengan rata-rata sebesar -11%.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan Daerah

ABSTRACT

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS MAMASA DISTRICT GOVERNMENT YEAR 2020-2022

**Mizpa Agatha Sapan
Suriyadi Nur**

This study aims to analyze the financial performance of the Mamasa Regency Government in 2020-2022 seen from 5 regional financial ratios: 1) Regional Financial Independence Ratio, 2) PAD Effectiveness Ratio, 3) Regional Financial Efficiency Ratio, 4) Harmony Ratio, 5) Growth Ratio . This study uses a quantitative descriptive method. This research was conducted at the Office of the Regional Financial Management Board of Mamasa Regency. Collecting data with the method of literature study, observation, interviews, and documentation. The type of data used is secondary data.

The results of this study indicate that: (1) The ratio of Regional Financial Independence with an average of 2.64% is categorized as very low where the contribution of PAD to regional income is still very low and income transfers are still very high. (2) The PAD Effectiveness Ratio with an average of 76.14% is categorized as less effective, which means that the performance of the Mamasa Regency Government can be said to be lacking in terms of realizing the planned PAD. (3) Regional Financial Efficiency Ratio with an average of 104.81% is categorized as ineffective because it has an average exceeding 100%, which means that the Mamasa Regency Government still has to minimize the amount of spending and increase its income so that there will be no more APBD deficits in the future (4) The compatibility ratio is considered not good because operating expenses are far greater than capital expenditures. (5) The Growth Ratio in terms of the PAD Growth Ratio is still not good with an average of -11%.

Keywords : Regional Financial Performance, Regional Financial Ratio

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	iii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	13
PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Kegunaan Penelitian	17
1.4.1 Kegunaan Teoritis	17
1.4.2 Kegunaan Praktis	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	23
2.2 Analisis Kinerja Keuangan Daerah	19
2.3 Analisis Rasio Keuangan Daerah	19
2.4 Tinjauan Empirik	23
2.5 Kerangka Berfikir	27
2.6 Definisi Operasional	28
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
3.1 Rancangan Penelitian	30

3.2	Tempat dan Waktu	30
3.3	Jenis dan Sumber Data	30
3.4	Teknik Pengumpulan Data	30
3.5	Pengukuran Variabel	31
3.6	Instrumen Penelitian.....	33
BAB IV		36
HASIL PENELITIAN.....		36
4.1	Gambaran Umum.....	36
4.1.1	Kabupaten Mamasa.....	36
4.1.2	Visi dan Misi.....	38
4.1.3	Struktur Organisasi.....	38
4.2	Hasil Penelitian	40
4.2.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	40
4.2.2	Rasio Efektivitas PAD.....	42
4.2.3	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	44
4.2.4	Rasio Keserasian.....	46
4.2.5	Rasio Pertumbuhan	48
4.2.6.	Rasio Kinerja Keuangan	49
BAB V		54
PENUTUP		54
5.1	Kesimpulan	54
5.2	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....		56
LAMPIRAN		57

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	25
3.1 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah	34
3.2 Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas PAD.....	35
3.3 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Keuangan.....	35
3.4 Kriteria Tingkat Pertumbuhan	36
4.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kab. Mamasa	37
4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	41
4.3 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD	44
4.4 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	46
4.5 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi.....	48
4.6 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal.....	48
4.7 Perhitungan Rasio Pertumbuhan.....	51
4.8 Perhitungan Rasio Kinerja Keuangan Dearah	52

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir	29
4.1 Struktur Organisasi	40

DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Realisasi APBD 2020	58
Laporan Realisasi APBD 2021	60
Laporan Realisasi APBD 2022	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi merupakan proses dimana pemerintah memberikan kebebasan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, mereka memiliki kekuasaan dan inisiatif untuk mengurus rumah tinggi sendiri, termasuk membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan kepentingan umum. (Saputra, Suwendra & Yudiaatmaja, F . 2018) Namun, agar dapat menilai kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan daerah yang jelas dan terukur.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merujuk pada kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang masih tersedia untuk menjalankan system pemerintahannya sendiri dengan memberikan pelayanan dan pembangunan yang optimal bagi masyarakatnya. (Wahidah Niken Kusumadewi, 2016) Tujuannya adalah agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat dan memperoleh kebebasan dalam mengalokasikan dana atau sumber daya yang tersedia untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran kinerja merupakan salah satu strategi untuk mencapai *good governance*, dengan menekankan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Secara mendasar, pentingnya pengukuran kinerja keuangan daerah adalah untuk membantu manajer public dalam menilai keberhasilan strategi melalui pengukuran finansial dan non finansial, serta untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Kinerja keuangan pemerintah daerah sendiri

merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu proyek dalam pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah dengan menggunakan system keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan untuk periode anggaran tertentu.

Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan suatu instansi yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan. Metode ini menggunakan perbandingan data keuangan dan perusahaan untuk meningkatkan signifikansi analisis. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio keuangan daerah digunakan untuk mengevaluasi efektivitasnya. Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor 105 Tahun 2000 juga menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan terhadap APBD merupakan alat yang tepat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Ada 5 (lima) rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah, seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Untuk mengevaluasi kinerja suatu periode, hasilnya dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengukuran kinerja sangat berguna untuk meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas Tindakan mereka. Pengukuran kinerja dapat juga digunakan untuk mengelola dan meningkatkan kinerja pemerintah. Menurut Chen (dalam Ni Ketut Erna : 1771) ada beberapa poin penting mengenai manfaat pengukuran kinerja antara lain : memberikan beberapa wawasan tentang ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen, untuk mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang sudah disepakati, serta sebagai

alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.

Sebagai organisasi dalam sektor publik, pemerintah daerah memiliki keharusan untuk memaksimalkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat, selain itu pemerintah juga harus selalu tanggap atas berbagai tuntutan dari lingkungan yang semakin hari semakin tinggi dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik, transparan dan berkualitas. Namun jika kita melihat sendiri, faktanya yang terjadi di lapangan masih ada saja pihak-pihak yang merupakan oknum dari pemerintah itu sendiri yang melakukan beberapa penyimpangan. Salah satu contoh penyimpangan yang masih sering kita dapati yang sering ditemui pada saat ini yaitu masih adanya penyelewengan penggunaan dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Fakta yang ditemui di lapangan, khususnya di Kabupaten Mamasa sendiri, masih banyak pembangunan yang belum optimal. Dikutip dari detikfinance, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah daerah (Pemda) belum optimal mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendorong pembangunan di daerah masing-masing. Beliau mengatakan bahwa pemanfaatan belanja daerah yang belum optimal menyebabkan ketimpangan yang cukup tinggi terhadap capaian kesejahteraan masyarakat antar daerah. Sri Mulyani menyebut Kabupaten Mamasa hanya mencapai 22,91% terkait capaian akses air minum layak.

Dikutip dari TRANSTIPO.com, pada tahun anggaran 2021, Pemkab Mamasa mengumumkan APBD pokok mengalami defisit sebanyak Rp 100 Miliar, dan pada tahun anggaran 2022 ini disebutkan bahwa defisit pokok APBD tahun 2022 sebesar Rp 214 Miliar. Hal ini menimbulkan beberapa persoalan dimana guru-guru menuai protes karena tunjangan sertifikasi mereka belum dibayarkan, selain itu protes juga muncul dari pihak tenaga kesehatan karena sejak triwulan

keempat tahun 2022, tenaga kesehatan khususnya tenaga kontrak belum mendapatkan gaji mereka. Melihat beberapa fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Merujuk dari penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai masalah kinerja keuangan, yang diteliti oleh Meliani Leopaitiba tahun 2022 mengenai Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dikategorikan rendah dengan rata-rata sebesar 42,03% dimana kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah serta pendapatan transfer sangat tinggi (2) Rasio Efektivitas dengan rata-rata sebesar 97,80% dikategorikan efektif yang artinya realisasi PAD terhadap target PAD hampir mencapai 100%. (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dengan rata-rata sebesar 79,93% dan dikategorikan efisien karena memiliki rata-rata kurang dari 100% yang artinya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menghemat anggaran secara optimal. (4) Rasio Keserasian dianggap belum baik, karena belanja operasi jauh lebih besar dibanding belanja modal. (5) Rasio Pertumbuhan ditinjau dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara fluktuatif. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,19%.

Meskipun penelitian terdahulu ini mengambil lingkup yang lebih luas yaitu pada lingkup provinsi Sulawesi Selatan namun penelitian ini masih terdapat celah didalamnya, dimana penelitian ini hanya berpatokan pada laporan keuangan yang ada, sehingga peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2020 - 2022" dengan menambahkan metode wawancara dan observasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2020-2022 yang diukur dengan menggunakan Rasio Keuangan Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2020-2022 diukur dengan menggunakan Rasio Keuangan Daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan mampu membawa manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini termasuk :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Khusus terkait Rasio Keuangan sebagai alat ukur Kinerja Keuangan, penggunaan teori dan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan dengan menyediakan data sebagai bukti empiris.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1) Bagi Universitas Fajar

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat memberikan suatu pengetahuan dalam ilmu akuntansi dan juga sebagai panduan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama.

2) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah yang menjadi subjek Penelitian dalam rangka peningkatan kinerja instansi.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keterampilan peneliti dalam penelitian karya ilmiah yang dilandasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh selama dalam bangku perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan menurut Irhan (2017:2) adalah evaluasi seberapa baik kinerja perusahaan dalam menerapkan pedoman implementasi keuangan yang efektif.

Halim (2007) mengemukakan pendapat bahwa salah satu indikator kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah dengan melihat kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah tersebut. Analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah harus dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, dan akuntabel (Mardiasmo, 2002).

Menurut Mardiasmo (2002 : 12), ada tiga fungsi penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu :

1. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berkonsentrasi pada sasaran dan tujuan program satuan kerja guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Untuk mendistribusikan sumber daya saat mengambil keputusan.
3. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dan mewujudkan akuntabilitas public.

Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menganalisis rasio keuangan daerah.

2.2 Analisis Rasio Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan target utama analisis rasio,yang membandingkan data dari satu periode ke periode

sebelumnya, sehingga dapat dilihat bagaimana perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun.

Merujuk dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meilani Leopaitiba (2022), Diah Argariny Patompo (2019) dan beberapa penelitian lain yang digunakan oleh peneliti sebagai rujukan dalam menulis penelitian ini yang menggunakan Lima Rasio Keuangan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah. Adapun rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, pembangunan serta pelayanan kepada mereka yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan yang diperlukan daerah. Besaran pendapatan asli daerah (PAD) dan besaran pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi dan dari pinjaman daerah, dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas PAD

Kemampuan pemerintahan daerah untuk merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya digambarkan dengan rasio efektivitas PAD.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Efektivitas PAD adalah :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Melalui Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dilihat perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk Mendapatkan penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima. Melalui perhitungan rasio ini, kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana yang dimilikinya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin dapat diartikan persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian mempunyai dua perhitungan yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini dapat

memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi, dimana belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dalam satu tahun fiskal, menjadikannya sementara dan kadang-kadang normal atau berulang.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio belanja operasi yaitu :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Dari perhitungan rasio ini, pembaca laporan dapat menentukan persentase belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi berupa belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Baik keuntungan rutin maupun jangka panjang berasal dari investasi modal.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio belanja modal yaitu :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dari satu periode ke periode berikutnya. Potensi mana yang perlu diperhatikan dapat dinilai dengan mengetahui peningkatan untuk setiap sumber pendapatan dan belanja (Abdul Halim, 2007).

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio Pertumbuhan adalah :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus menyampaikan laporan keuangan daerahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya. Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengungkapkan bahwa dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang sudah diterapkan.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit di dalamnya. Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. (Agnes Widiyanti, 2019)

2.4 Tinjauan Empirik

Berikut ini beberapa Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Meliani Leopaitiba (2022)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Dearah Provinsi Sulawesi Selatan	<p>Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dikategorikan rendah dengan rata-rata sebesar 42,03% dimana kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah serta pendapatan transfer sangat tinggi, Rasio Efektivitas dengan rata-rata sebesar 97,80% dikategorikan efektif yang artinya realisasi PAD terhadap target PAD hampir mencapai 100%, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dengan rata-rata sebesar 79,93% dan dikategorikan efisien karena memiliki rata-rata kurang dari 100% yang artinya Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan sudah menghemat anggaran secara optimal, Rasio Keserasian dianggap belum baik karena belanja operasi jauh lebih besar dibanding belanja modal, Rasio Pertumbuhan ditinjau dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara fluktuatif. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,19%.</p>

2.	Rahmat Hidayat (2022)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Tahun 2017-2021)	<p>Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo dari tahun 2017-2021 apabila dilihat dari Rasio Kemandirian masih sangat rendah karena termasuk dalam pola instruktif. Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Wajo berjalan efektif dengan rata-rata 97,68%. Pada rasio Efisiensi Keuangan Daerah dikategorikan cukup efisien dengan rata-rata 86,81%. Rasio Keserasian Belanja Daerah masih belum stabil dimana pengeluaran belanja operasi masih lebih besar dibandingkan belanja modal, sehingga dikatakan Pemerintah Kabupaten Wajo masih kurang memperhatikan pembangunan daerahnya. Rasio Pertumbuhan belum stabil karena setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang tergolong masih sangat rendah karena rata-ratanya masih dibawah 10%. Pemerintah Kabupaten Wajo sebaiknya memperbaiki 4 rasio yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.</p>
3.	Diah Argariny	Analisis Kinerja Keuangan	<p>Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa bahwa rasio efektivitas dapat digolongkan</p>

	Patompo, Victorya Untu (2019)	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sngihe Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013-2016	tidak efektif, rasio efisiensi diberi label tidak efisien, rasio keserasian menunjukkan bahwa belanja operasi direalisasikan lebih sering dari pada belanja modal, yang berarti bahwa rasio keserasian tergolong kurang begitu baik, rasio pertumbuhan meningkat setiap tahunnya, rasio kemandirian masih cukup rendah, dan pola koneksi bersifat informatif menunjukkan bahwa fungsi pemerintah pusat lebih dominan dari pada independensi pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sngihe diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya lagi.
4.	Salwa Qur'ani, Endang Kartini Panggiarti (2021)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Pada Pemerintahan Kota Magelang	Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa rasio kemandirian 38,73% tergolong rendah atau tidak mandiri, rasio efektivitas 110,85% tergolong efektif, rasio efisiensi 110,22% tergolong tidak efisien, rasio keserasian/aktivitas belanja tergolong tidak efisien. Rasio belanja operasional 87,16% dan rasio belanja modal 24,66% tergolong kurang harmonis, dan rasio pertumbuhan 10,16% tergolong rendah. Temuan dari penelitian ini berimplikasi pada bagaimana seharusnya Kota Magelang mengelola

			<p>sumber daya daerah yang belum diolah, serta bagaimana sebaiknya mengalokasikan dana untuk belanja rutin dan belanja pembangunan. Kota Magelang harus terus meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.</p>
5.	Endang Purwanti, Elien Noviyanti (2021)	<p>Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018</p>	<p>Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa kinerja keuangan daerah Kota Salatiga dapat digolongkan tidak efektif berdasarkan Rasio Efektivitas PAD dengan rata-rata efektivitas sebesar 85,22%, dan digolongkan efisien berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerah dengan rata-rata sebesar 96,61%. Berdasarkan rasio keserasian, dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan lebih banyak dana untuk belanja operasional daerah. Pada tahun 2018, rasio pertumbuhan justru mengalami penurunan.</p>

2.5 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1



Sumber : Data Diolah (2023)

2.6 Definisi Operasional

Definisi operasional menggambarkan penelitian sebagai indikator bagaimana suatu variabel diukur untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. Definisi operasional ini memberikan definisi untuk istilah-istilah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan yang dimiliki pemerintah daerah ditunjukkan oleh rasio kemandirian keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat, menggambarkan kompetensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan luar semakin berkurang seiring dengan naiknya rasio ini, begitu pula sebaliknya. (Febby Randria Ramadhani, 2016).

b. Rasio Efektivitas PAD

Kemampuan pemerintahan daerah untuk merealisasikan pendapatan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya digambarkan dengan rasio efektivitas PAD. (Halim, 2002 : 129).

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah membandingkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya diperoleh. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%, maka kemampuan daerah dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dikatakan efisien.

d. Rasio Keserasian

Rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan keuangannya untuk belanja modal dan biaya operasional dikenal sebagai rasio keserasian.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan dihitung dengan menghitung pertumbuhan setiap komponen pendapatan (PAD dan pendapatan total) dan pengeluaran (belanja pembangunan), sehingga pemerintah daerah dapat menentukan seberapa besar keberhasilan yang mampu dipertahankan ataupun ditingkatkan dari satu periode ke periode berikutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Sebuah penelitian memerlukan adanya rancangan penelitian agar penelitian tersebut bisa berjalan secara sistematis dan baik. Rancangan penelitian merupakan desain dalam melaksanakan penelitian yang digunakan sebagai acuan pada proses penelitian. Adapun rancangan penelitian yang akan dipakai oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan sumber data pelaporan keuangan APBD Kabupaten Mamasa.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kantor BPKD Kabupaten Mamasa dan dilakukan sejak bulan Mei sampai dengan Juli 2023.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan tujuan agar dapat lebih mendeskripsikan peristiwa agar data yang disajikan dapat memudahkan orang lain dalam memperoleh informasi. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang berupa laporan APBD tahun anggaran 2020-2022.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, ialah mempelajari teori dan artikel yang berhubungan dengan rumusan masalah.

2. Observasi, merupakan sebuah teknik yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamasa.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data atau dokumen yang mendukung penelitian dalam hal ini berupa laporan APBD .
4. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan Narasumber.

3.5 Pengukuran Variabel

Pengukuran variable menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur suatu variable beserta alasan yang mendasarinya.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, pembangunan serta pelayanan kepada mereka yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan yang diperlukan daerah.

Rumus perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatam Transfer} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas PAD

Kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya digambarkan dengan rasio efektivitas PAD.

Semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rumus perhitungan Rasio Efektivitas PAD :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah membandingkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya diperoleh.

Rumus perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Dearah}} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan keuangannya untuk belanja modal dan biaya operasional.

Rasio belanja operasi dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Rasio belanja operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan rasio belanja modal dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dari satu periode ke periode berikutnya.

Rumus perhitungan Rasio Pertumbuhan :

$$\text{Rasio Pertumbuhn} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini ialah dengan melihat tingkat pengukuran dari masing-masing rasio yang digunakan (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan). Adapun tingkat pengukuran dari masing-masing rasio ini adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan luar (khususnya dari pemerintah pusat dan provinsi) menurun dengan meningkatnya rasio ini, begitu juga sebaliknya.

Untuk tingkat pengukuran rasio ini, digunakan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian
Rendah Sekali	0 – 25
Rendah	26 – 50
Sedang	51 – 75
Tinggi	76 – 100

Sumber : Kepmendagri Nomor 960.900.327 tahun 1996

2. Rasio Efektivitas PAD

Semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Untuk tingkat pengukuran rasio efektivitas maka digunakan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.2

Kriteria Kinerja Efektivitas Keuangan Daerah

Kinerja	Persentasi Kinerja Keuangan (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	91 – 100
Cukup Efektif	81 – 90
Kurang Efektif	61 – 80
Tidak Efektif	< 60

Sumber : Kepmendagri Nomor 960.900.327 tahun 1996

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah artinya kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 3.3

Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria	Presentase Efisiensi (%)
Tidak Efisien	>100
Kurang Efisien	90 – 100
Cukup Efisien	80 – 90
Efisien	60 – 80
Sangat Efisien	<60

Sumber : Kepmendagri Nomor 960.900.327 tahun 1996

4. Rasio Keserasian

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk belanja rutin dapat diartikan persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

5. Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim (2008), pertumbuhan keuangan dapat dikatakan baik jika pertumbuhan persentase setiap tahunnya positif atau mengalami peningkatan, dan demikian juga sebaliknya.

Untuk tingkat pengukuran rasio pertumbuhan maka digunakan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.4

Kriteria Tingkat Pertumbuhan

Kriteria	Tingkat Pertumbuhan (%)
Sangat Rendah	0 – 10
Rendah	11 – 20
Sedang	21 – 30
Tinggi	>40

Sumber : Abdul Halim (2007, 196)

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

Gambaran Umum dari Kabupaten Mamasa yang diambil peneliti sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut.

4.1.1 Kabupaten Mamasa

Kabupaten Mamasa dengan ibukotanya Mamasa secara geografis terletak di tengah Pulau Sulawesi dengan wilayah daratannya berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan berbagai potensi produk hasil pertanian.

Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Mamasa terletak antara 119°00'216" hingga 119°51'17" Bujur Timur dan 2° 39'216" - 3° 19'288" Lintang Selatan. Secara administratif Kabupaten Mamasa mempunyai batas daerah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju
- b. Sebelah Timur : Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Toraja dan Kabupaten Pinrang)
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Polewali Mandar
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Mamasa terbagi atas 17 Kecamatan, 168 Desa dan 13 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kab. Mamasa

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kel.	Luas (Km ₂)	Tinggi Wilayah (dpl)
1.	Kec. Sumarorong	8	2	254,00	325 – 2.100
2.	Kec. Messawa	8	1	150,88	300 – 1.750
3.	Kec. Pana	12	1	181,27	325 – 2.325
4.	Kec. Nosu	6	1	113,33	1.437 – 2.450
5.	Kec. Tabang	6	1	304,51	700 – 2.750
6.	Kec. Mamasa	11	1	250,07	1.025 – 3.000
7.	Kec. Tanduk Kalua	11	1	120,85	1.050 – 2.000
8.	Kec. Balla	8	0	59,35	1.100 – 1.875
9.	Kec. Sesenapadang	10	0	152,70	1.300 – 2.600
10.	Kec. Tawalian	3	1	45,99	1.200 – 2.275
11.	Kec. Mambi	11	2	142,66	175 – 1.550
12.	Kec. Bambang	20	0	136,17	950 – 1.475
13.	Kec. Rantebulahan Timur	8	0	31,87	850 – 2.725
14.	Kec. Mehalaan	11	0	162,43	650 – 655
15.	Kec. Aralle	11	1	173,96	500 – 2.350
16.	Kec. Buntu Malangka	11	0	211,71	650 – 950
17.	Kec. Tabulahan	11	1	513,95	100 – 2.950
	Jumlah	168	13	3.005,88	

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Mamasa 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Mamasa pada tahun 2022 mencapai 166.471 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 54,35 jiwa/km₂ dari luas wilayah sebesar 3.005,88 km₂.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Mamasa adalah “MEWUJUDKAN KABUPATEN MAMASA YANG MAJU , AMAN DAN SEJAHTERA DALAM KEHIDUPAN YANG HARMONIS SERTA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN ADAT ISTIADAT.”

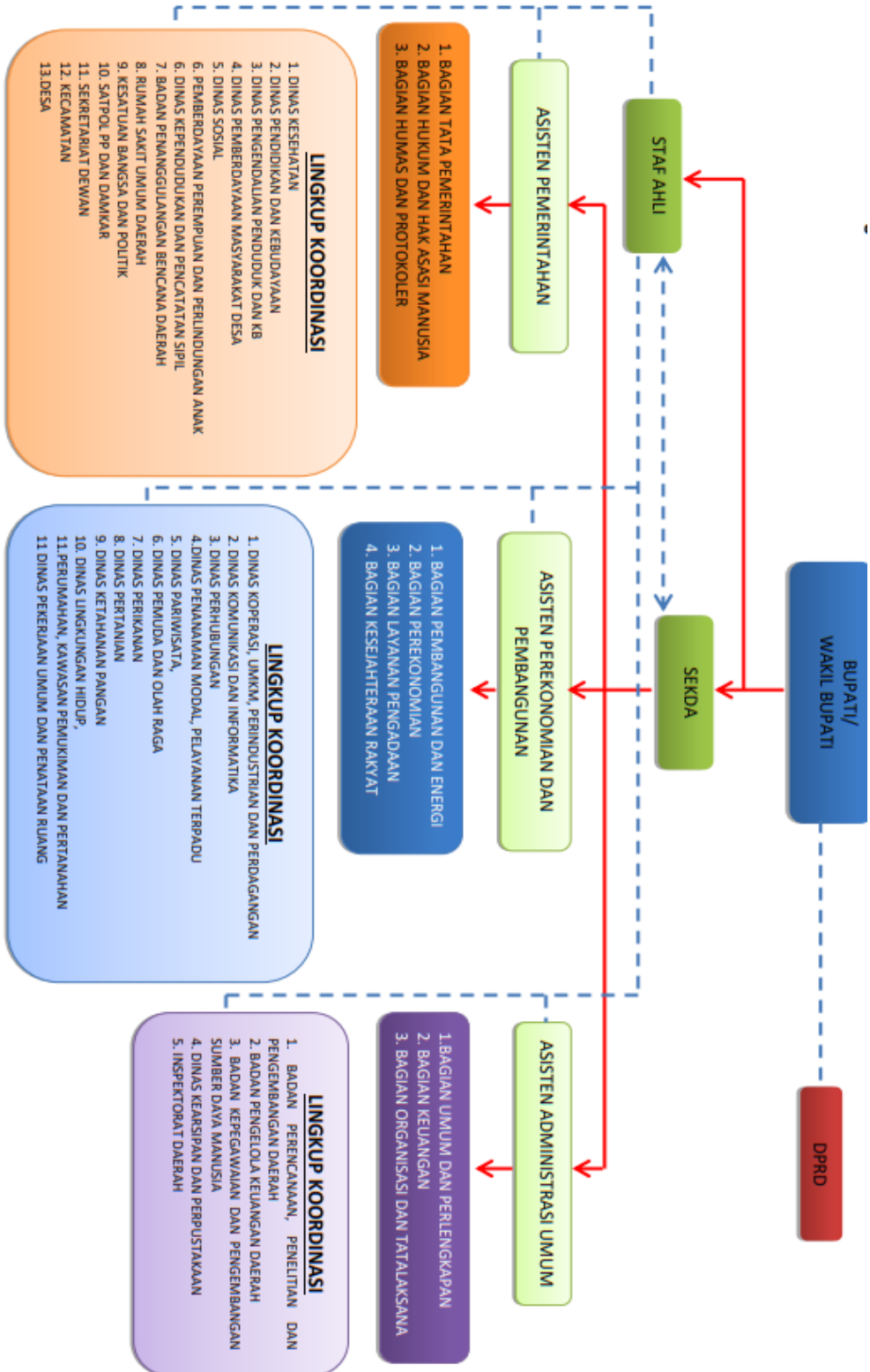
Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk mencapai Visi di atas adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, listrik, telekomunikasi serta air bersih yang mendukung pengembangan ekonomi daerah dan aktivitas sosial kemasyarakatan.
2. Meningkatkan kemampuan dan daya tahan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor unggulan yang memperluas lapangan kerja.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas management pemerintahan dan citra pelayanan terbaik yang *berbasis e-Government* dan inovasi pada semua bidang layanan pemerintah.
5. Mewujudkan stabilitas sosial dan politik yang sangat kondusif dalam bingkai kearifan lokal.

4.1.3 Struktur Organisasi

Adapun struktur pemerintahan daerah Kabupaten Mamasa periode 2018-2023 adalah :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber : LKjIP Kabupaten Mamasa Tahun 2020

4.2 Hasil Penelitian

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020-2022 merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa dengan cara menghitung rasio keuangan .

4.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Berikut hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa :

Tabel 4.1

**Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa
Tahun Anggaran 2020-2022**

TA	Total PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Kriteria Penelitian
2020	31.144.643.233,24	863.091.651.164,00	3,60 %	Rendah Sekali
2021	16.643.739.465,36	835.926.966.928,00	1,99%	Rendah Sekali
2022	19.305.880.880,30	828.539.932.875,00	2,33%	Rendah Sekali

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Mamasa (data diolah, 2023)

Tahun 2020

$$RKKD = \frac{31.144.643.233,24}{863.091.651.164,00} \times 100\% = 3,60\%$$

Tahun 2021

$$RKKD = \frac{16.643.739.465,36}{835.926.966.928,00} \times 100\% = 1,99\%$$

Tahun 2022

$$\text{RKKD} = \frac{19.305.880.880,30}{828.539.932.875,00} \times 100\% = 2,33\%$$

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Mamasa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 PAD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 31.144.643.233,24 sehingga persentasenya sebesar 3,32% dari total pendapatan, dan pada tahun 2021 PAD Kabupaten Mamasa mengalami penurunan menjadi Rp. 16.643.739.465,36 dan persentasenya hanya sebesar 1,84% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2022 PAD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 19.305.880.880,30 dengan persentase 2,23% dari total pendapatan.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa pendapatan transfer atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah pusat mengalami penurunan setiap tahunnya tapi pendapatan ini tidak lebih besar dari pada PAD Kabupaten Mamasa sendiri. Pada tahun 2020 pendapatan transfer yang diperoleh Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 863.091.651.164,00 atau memiliki persentase 92,15% dari total pendapatan, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 835.926.966.928,00 atau sebesar 92,88% dari total pendapatan dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 828.539.932.875,00 atau sebesar 96,08% dari total pendapatan.

Hasil analisis yang diperoleh pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa dengan melihat rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mamasa tahun 2020-2022 masih tergolong sangat rendah dengan rata-rata sebesar 2,64% kurang dari 50%. Pada tahun 2020 tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mamasa hanya sebesar 3,60%, tahun 2021 turun menjadi 1,99% dan pada tahun 2022 naik kembali menjadi 2,33%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat

ketergantungan pemerintah Kabupaten Mamasa masih sangat tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah tiap tahunnya yang digunakan untuk urusan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Amir, S.IP (Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan BPKD Kabupaten Mamasa). Pernyataan beliau mengenai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mamasa adalah :

“Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mamasa sangatlah kecil karena Kabupaten Mamasa memang masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Rasio kemandirian yang masih sangat rendah ini mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mamasa dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembaangunan daerahnya masih sangat bergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat.”

4.2.2 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah daerah. Berikut ini hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Mamasa :

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Mamasa
Tahun Anggaran 2020-2022

TA	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria Penilaian
2020	31.144.643.233,24	32.374.434.935,40	96,20%	Efektif
2021	16.643.739.465,36	23.343.161.766,04	71,30%	Kurang Efektif
2022	19.305.880.880,30	31.688.367.590,00	60,92%	Tidak Efektif

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Mamasa (data diolah, 2023)

Tahun 2020

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{31.144.643.233,24}{32.374.434.935,40} \times 100\% = 96,20\%$$

Tahun 2021

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{16.643.739.465,36}{23.343.161.766,04} \times 100\% = 71,30\%$$

Tahun 2022

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{19.305.880.880,30}{31.688.367.590,00} \times 100\% = 60,92\%$$

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten Mamasa mengalami fluktuasi selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 PAD yang dianggarkan sebesar Rp. 32.374.434.935,40 atau 3,40% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2021 anggaran PAD diturunkan menjadi Rp. 23.343.161.766,04 atau 2,57% dari total anggaran pendapatan dan pada tahun 2022 pemerintah menganggarkan PAD sebesar Rp. 31.688.367.590,00 atau 3,50% dari total anggaran pendapatan.

Realisasi PAD Kabupaten Mamasa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 realisasi PAD sebesar Rp. 31.144.643.233,24 atau 3,32% dari total realisasi pendapatan. Pada tahun 2021 realisasi PAD turun menjadi Rp. 16.643.739.465,36 atau 1,84% dari total realisasi pendapatan, dan pada tahun 2022 realisasi PAD naik kembali menjadi Rp. 19.305.880.880,30 atau sebesar 2,23% dari total realisasi pendapatan.

Hasil analisis yang diperoleh pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa dengan melihat rasio efektivitas yang dihasilkan daerah Kabupaten Mamasa tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tahun 2020 memiliki nilai sebesar 96,20%, tahun 2021 turun menjadi 71,30% dan tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 60,92%, jadi dapat dilihat bahwa selama tiga tahun berturut-turut selalu mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel 4.2 diatas rata-rata rasio efektivitas PAD selama 3 tahun berturut-turut sebesar 76,14% dan sesuai kriteria rasio ini dikategorikan kurang efektif yang berarti kinerja Pemerintah Kabupaten Mamasa dapat dikatakan masih kurang dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan, khususnya pada tahun 2022 anggaran pendapatan pajak daerah yaitu sebesar Rp.11.660.155.980,00 namun realisasinya hanya sebesar Rp.5.940.656.902,00 selain itu anggaran untuk Lain-lain PAD Yang Sah yaitu sebesar Rp.10.567.703.644,00 namun realisasinya hanya sebesar 3.191.926.970,30.

Prenulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Amir, S.IP (Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan BPKD Kabupaten Mamasa), dan hasil wawancara dengan beliau, beliau menyatakan bahwa :

“Untuk saat ini PAD terbesar Kabupaten Mamasa berasal dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam hal ini penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan juga berasal dari pajak restoran”

4.2.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara berapa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berikut ini hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa :

Tabel 4.3
Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa
Tahun Anggaran 2020-2022

TA	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kriteria Penilaian
2020	947.218.415.455,53	936.597.348.120,24	101,13%	Tidak Efisien
2021	925.410.149.297,76	899.975.331.832,36	102,82%	Tidak Efisien
2022	952.869.141.656,94	862.291.293.860,30	110,50%	Tidak Efisien

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Mamasa (data diolah, 2023)

Tahun 2020

$$\text{REKD} = \frac{947.218.415.455,53}{936.597.348.120,24} \times 100\% = 101,13\%$$

Tahun 2021

$$\text{REKD} = \frac{925.410.149.297,76}{899.975.331.832,36} \times 100\% = 102,82\%$$

Tahun 2022

$$\text{REKD} = \frac{952.869.141.656,94}{862.291.293.860,30} \times 100\% = 110,50\%$$

Dari tabel 4.3 di atas diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kabupaten Mamasa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan dan kenaikan selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 belanja daerah Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 947.218.415.455,53, turun menjadi Rp. 925.410.149.297,76 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi Rp. 952.869.141.656,94.

Total Pendapatan daerah Kabupaten Mamasa juga mengalami penurunan sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020 total pendapatan daerah sebesar Rp. 936.597.348.120,24 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 899.975.331.832,36 dan kembali turun menjadi Rp. 862.291.293.860,30 pada tahun 2022.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.3 diatas, Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa tahun 2020-2022 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya berada diatas 100% hal ini terjadi karena total realisasi belanja lebih besar daripada total realisasi pendapatan yang berarti selama tiga tahun berturut-turut terjadi defisit APBD.

4.2.4 Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio Keserasian Kabupaten Mamasa
Tahun Anggaran 2020-2022
(Belanja Operasi)

TA	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Keserasian Belanja Operasi
2020	801.381.908.707,53	947.218.415.455,53	84,60%
2021	605.452.809.449,60	925.410.149.297,76	65,42%
2022	612.000.476.082,36	952.869.141.656,94	64,22%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Mamasa (data diolah, 2023)

Tahun 2020

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{801.381.908.707,53}{947.218.415.455,53} \times 100\% = 84,60\%$$

Tahun 2021

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{605.452.809.449,60}{925.410.149.297,76} \times 100\% = 65,42\%$$

Tahun 2022

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{612.000.476.082,36}{952.869.141.656,94} \times 100\% = 64,22\%$$

Tabel 4.5
Perhitungan Rasio Keserasian Kabupaten Mamasa
Tahun Anggaran 2020-2022
(Belanja Modal)

TA	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Keserasian Belanja Moodal
2020	118.738.794.658,00	947.218.415.455,53	12,53%
2021	96.750.682.097,94	925.410.149.297,76	10,45%
2022	135.421.306.374,58	952.869.141.656,94	14,21%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Mamasa (data diolah, 2023)

Tahun 2020

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{118.738.794.658,00}{947.218.415.455,53} \times 100\% = 12,53\%$$

Tahun 2021

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{96.750.682.097,94}{925.410.149.297,76} \times 100\% = 10,45\%$$

Tahun 2022

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{135.421.306.374,58}{952.869.141.656,94} \times 100\% = 14,21\%$$

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kabupaten Mamasa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2020 belanja daerah Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 947.218.415.455,53 turun menjadi Rp. 925.410.149.297,76 pada tahun 2021 dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi Rp. 952.869.141.656,94.

Total realisasi belanja operasi daerah Kabupaten Mamasa yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022, masing-masing sebesar : Rp. 801.381.908.707,53 ; 605.452.809.449,60 ; 612.000.476.082,36. Begitu juga dengan total realisasi belanja modal yang terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan , Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang juga mengalami kenaikan dan penurunan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Penurunan terjadi pada tahun 2021 dan kembali naik pada tahun 2022.

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa untuk rasio keserasian belanja operasi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rasio belanja operasi pada tahun 2020 sebesar 84,60%, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 65,42% dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 64,22%. Sedangkan dari hasil perhitungan pada tabel 4.5 diatas diketahui bahwa untuk rasio keserasian belanja modal mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio belanja modal pada tahun 2020 sebesar 12,53%, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 10,45% dan pada tahun 2022 kembali mengalami peninngkatan menjadi 14,21%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Amir, S.IP (Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan BPKD Kabupaten Mamasa), dan beliau mengatakan bahwa :

“Belanja terbesar daerah diarahkan ke belanja pegawai dalam hal ini untuk membayar gaji guru, gaji tenaga kesehatan dan lainnya dan ini sifatnya wajib.”

4.2.5 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menilai besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang sudah tercapai dari satu periode ke periode lainnya. Berikut ini hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Mamasa :

Tabel 4.6

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Mamasa

Tahun Anggaran 2020-2022

TA	Realisasi Penerimaan PAD Xn	Realisasi Penerimaan PAD Xn-1	Rasio Pertumbuhan
2020	31.144.643.233,24	31.929.447.978,44	-2,45%
2021	16.643.739.465,36	31.144.643.233,24	-46,55%
2022	19.305.880.880,30	16.643.739.465,36	15,99%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Mamasa (data diolah, 2023)

Tahun 2020

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{31.144.643.233,24 - 31.929.447.978,44}{31.929.447.978,44} \times 100\% = -2,45\%$$

Tahun 2021

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{16.643.739.465,36 - 31.144.643.233,24}{31.144.643.233,24} \times 100\% = -46,55\%$$

Tahun 2022

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{19.305.880.880,30 - 16.643.739.465,36}{16.643.739.465,36} \times 100\% = 15,99\%$$

Dari hasil perhitungan yang diperoleh pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan pada tahun 2020 memiliki nilai sebesar -2,45% tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi -46,55% ini disebabkan karena realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya lebih besar daripada realisasi penerimaan PAD tahun berjalan, dan pada tahun 2022 PAD mengalami pertumbuhan yang positif karena tingkat rasio pertumbuhannya meningkat menjadi 15,99%.

Berdasarkan perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD, PAD Kabupaten Mamasa mengalami kenaikan dan penurunan dan rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD dari 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan hasil yang negatif yaitu sebesar -11%.

4.2.6. Rasio Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan tahun anggaran 2020 – 2022 diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa
Tahun Anggaran 2020-2022

KETERANGAN	TAHUN ANGGARAN	KATEGORI
------------	----------------	----------

	2020	2021	2022	RATA-RATA	
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	3,60%	1,99%	2,33%	2,64%	Rendah Sekali
Rasio Efektivitas PAD	96,20%	71,30%	60,92%	76,14%	Kurang Efektif
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	101,13%	102,82%	110,50%	104,81%	Tidak Efisien
Rasio Kesenjangan					
- Belanja Operasi	84,60%	65,42%	64,22%	71,41%	-
- Belanja Modal	12,53%	10,45%	14,21%	12,39%	-
Rasio Pertumbuhan	-2,45%	-46,55%	15,99%	-11%	-

Sumber : Data Diolah (2023)

4.3 Pembahasan

Adapun pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

4.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mamasa dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Amir, S.IP (Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan BPKD Kabupaten Mamasa) bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mamasa masih tergolong sangat kecil karena kabupaten Mamasa memang masih tergolong daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal keuangan. Kabupaten Mamasa belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga menjadi salah satu penyebab PAD yang dihasilkan pemerintah Kabupaten Mamasa sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sehingga masih bergantung kepada bantuan pemerintah pusat.

4.3.2 Rasio Efektivitas PAD

Dari Hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Mamasa juga dikategorikan belum efektif dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Hasil wawancara dengan Bapak Amir, S.IP (Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan BPKD Kabupaten Mamasa) bahwa PAD terbesar Kabupaten Mamasa berasal dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam hal ini penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan juga berasal dari pajak restoran. Namun meskipun kedua sektor ini menyumbang pendapatan yang lebih besar dalam PAD namun tidak cukup untuk mencapai annggaran PAD yang telah direncanakan oleh pemerintah. PAD yang telah direncanakan yang tidak sesuai dengan realisasinya ini menjadi jawaban atas fenomena defisit yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut di Kabupaten Mamasa ini. Defisit yang terjadi ini berdampak pada munculnya beberapa permasalahan salah satunya terjadi protes dari pihak tenaga kesehatan (Nakes) berstatus kontrak karena gaji triwulan empat tahun 2022 yang belum dibayarkan hingga memasuki triwulan pertama di tahun 2023.

4.3.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Selama tiga tahun berturut-turut pemerintah Kabupaten Mamasa selalu mengalami defisit yang bahkan mencapai angka Milyaran rupiah. Hal ini juga dapat dilihat dari perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah yang tidak efisien. Mengatasi hal ini, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Mamasa melakukan pinjaman daerah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebanyak Rp.97M Mengutip dari Transtipo.com. Utang daerah berjangka lima tahun itu akan dilunasi Pemerintah Kabupaten Mamasa bersamaan pokok dan bunganya yang mencapai Rp120 Miliar. Pada 2022, pinjaman daerah dari PEN itu dipakai untuk mengerjakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Mamasa. Hal ini menjadi jawaban mengapa Kabupaten Mamasa masih termasuk

daerah dengan akses air minum layak yang masih kurang yaitu hanya mencapai 22,19% Sesuai Penuturan Sri Mulyani karena Pemerintah masih memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan yang memang sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

4.3.4 Rasio Keserasian

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi dikarenakan besarnya pengeluaran untuk belanja pegawai dan hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Amir, S.IP (Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan BPKD Kabupaten Mamasa) yang mengatakan bahwa Belanja terbesar daerah diarahkan ke belanja pegawai dalam hal ini untuk membayar gaji guru, gaji tenaga kesehatan dan lainnya dan ini sifatnya wajib. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamasa lebih mengutamakan pemenuhan pengeluaran-pengeluaran rutin dan belum memperhatikan pembangunan daerah, namun tetap pemerintah memperhatikan pembangunan daerah lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimana alokasi dananya digunakan untuk mengerjakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Mamasa. Meskipun pemerintah Kabupaten Mamasa sudah menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur jalan ini namun diharapkan agar realisasinya tetap di lakukan pengawasan agar pengerjaannya dapat dilakukan dengan baik dan tepat pada sasarannya.

4.3.5 Rasio Pertumbuhan

Dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD, Kabupaten Mamasa menunjukkan hasil yang sangat rendah karena menyentuh hasil yang negatif yaitu sebesar - 11%. Kabupaten Mamasa memang masih tergolong daerah yang masih tertinggal

dari pada daerah-daerah yang lain. Masyarakatnya masih terbelenggu di bawah garis kemiskinan , bahkan masyarakatnya masih tergolong sangat miskin. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Mamasa harus selalu meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depannya.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa jika dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan rata-rata 2,64% dan dikategorikan rendah sekali dimana kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih sangat rendah serta pendeptatan transfer masih sangat tinggi. Rasio kemandirian yang masih sangat rendah ini mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mamasa dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembaangunan daerahnya masih sangat bergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa jika dilihat dari rasio Efektivitas PAD dengan rata-rata sebesar 76,14% dan dikategorikan kurang efektif yang berarti kinerja Pemerintah Kabupaten Mamasa dapat dikatakan masih kurang dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa jika dilihat dari rasio Efisiensi Keuangan Daerah dengan rata-rata sebesar 104,81% dan dikategorikan tidak efisien karena memiliki rata-rata melebihi 100% yang artinya Pemerintah Kabupaten Mamasa masih harus meminimalisir jumlah belanjanya dan meningkatkan pendapatannya agar tidak lagi terjadi defisit APBD kedepannya.

4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa jika dilihat dari Rasio Keserasian rata-rata belanja operasinya sebesar 71,41% dan belanja modal hanya sebesar 12,39% yang artinya Pemerintah Kabupaten Mamasa lebih mengutamakan pemenuhan pengeluaran-pengeluaran rutin dan belum memperhatikan pembangunan daerah.
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan dengan rata-rata sebesar -11% dikarenakan pada tahun 2021 PAD sangat menurun dibandingkan dengan PAD pada tahun sebelumnya dan pada tahun 2022 jumlahnya naik meskipun hanya sedikit. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamasa tergolong masih sangat rendah karena rata-ratanya dibawah 10% bahkan menunjukkan hasil yang negatif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dan masukan yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Mamasa masih sangat perlu memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerahnya karena masih tergolong rendah. Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah dengan cara memaksimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Mamasa juga sebaiknya lebih memperhatikan pengeluaran/belanjanya dan meningkatkan pendapatannya agar tidak lagi terjadi defisit APBD kedepannya.
3. Pemerintah Kabupaten Mamasa sebaiknya memperhatikan pengalokasian belanjanya dalam hal ini mengurangi belanja operasi dan meningkatkan belanja modal sehingga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Salemba 4 : Jakarta
- Anisa Indraini. 2021. *Sri Mulyani Heran Semua Daerah 'Dibagi Duit', Kok Masih Ada Yang Tertinggal*, (Online), (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5721676/sri-mulyani-heran-semua-daerah-dibagi-duit-kok-masih-ada-yang-tertinggal> / diakses 30 Mei 2023).
- Batubara, A. H. (2006). Konsep good governance dalam konsep otonomi daerah.
- Borolayuk, M., & Menne, F. (2016). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA TERHADAP EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH.
- Depdagri. 1997. Kepmendagri No. 690.900.327, 1996, *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34-38.
- Julastiana, Y., & Suartana, I. W. (2012). Analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten klungkung. *Download: [http://www. google. com](http://www.google.com). Diakses tanggal, 17*.
- Kusumadewi, W. N., & Ilat, V. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Mailangkay, P. P., Murni, S., & Rate, P. V. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3).
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogya
- Patompo, D. A., & Untu, V. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe Provinsi Sulawesi Utara
- Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor 105 Tahun 2000 *tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Among Makarti*, 14(2).
- Qur'ani, S., & Panggiarti, E. K. (2021). Analisis Rasio Keuangan Daerah sebagai Penilaian Kinerja pada Pemerintahan Kota Magelang. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 60-70.

- Rahmawati, N. K. E., & Putra, I. W. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 1767-1795.
- Ramadhani, F. R. (2016). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 85-98.
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2016). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANATAHUN. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 136-145.
- Tahun 2013-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3).
- Transtipo. 2022. *Turbulensi APBD Mamasa: Defisit Keuangan dan Pinjaman Daerah Beruntun*, (Online), (<https://www.transtipo.com/kabupaten-mamasa/turbulensi-apbd-mamasa-defisit-keuangan-dan-pinjaman-daerahberuntun/#:~:text=Tahun%20anggaran%202022%20ini%2C%20pihak,sebut%20sumber%20di%20DPRD%20Mamasa> / diakses 30 Mei 2023).
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*

L

A

M

P

I

R

A

N

